

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Konsep Pengembangan Pariwisata

2.1.1.1. Pengembangan

Muljadi (2009: 27) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik wisata yang meliputi kekayaan alam yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, tradisi serta keanekaragaman budaya dan seni serta sejarah dan peninggalan kuno. Pengembangan pariwisata menurut Suswantoro, 2004 (dalam Ismail 2020) dalam pengembangan pariwisata harus dilakukan melalui:

- a. Promosi, merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan secara terpadu baik di dalam maupun diluar negeri;
- b. Akseibilitas, merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sektor, dan;
- c. Kawasan pariwisata. Ketiga inilah yang nantinya sebagai solusi dalam mengembangkan aspek kepariwisataan di Indonesia.

Dalam pembangunan pariwisata, sektor publik dan swasta akan saling berperan serta dan bekerjasama. Perkembangan ini harus memperhatikan ruang lingkup budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Industri pariwisata perlu dikembangkan dengan tepat karena dapat berdampak positif bagi wisatawan dan masyarakat tuan rumah. Pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup dengan mengunjungi manfaat ekonomi wisatawan. (Robert dalam Any 2016)

Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur serta menyediakan fasilitas rekreasi sehingga wisatawan dan penduduk setempat saling diuntungkan. Keberhasilan pengembangan pariwisata dibutuhkan perencanaan atau strategi yang fleksibel dan

menyeluruh. Fleksibilitas dibutuhkan untuk penyesuaian dan perumusan strategi dalam menanggapi perubahan internal maupun eksternal. Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan ketelitian karena berkaitan dengan ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya. (Fletcher dalam Any 2016).

Pembangunan pariwisata merupakan pekerjaan yang terencana dan terstruktur dengan tujuan untuk memperbaiki obyek dan kawasan yang ada serta menetapkan obyek dan kawasan wisata baru yang akan dijual kepada calon wisatawan. Pada prinsipnya pengembangan pariwisata sama dengan pengembangan pariwisata. Pengembangan produk pariwisata sebagai sarana pariwisata harus menyesuaikan dengan perubahan selera wisatawan yang dinamis. Untuk kemajuan pengembangan pariwisata, ada beberapa usaha yang perlu dilakukan secara terpadu dan dengan baik, yaitu:

1. Promosi untuk memperkenalkan objek dan kawasan wisata.
2. Transportasi yang lancar
3. Kemudahan keimigrasian atau birokrasi
4. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman
5. Pemandu wisata yang cakap
6. Penawaran barang-barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar.
7. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik
8. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. (Sutiarso, 2018).

2.1.1.2. Pengelolaan Pariwisata

Balderton (dalam Adisasmita, 2011), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggunakan, mengorganisasikan serta mengarahkan kepada usaha manusia untuk dapat memanfaatkan secara efektif material serta fasilitas dalam mencapai suatu tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan kegiatan, akan tetapi juga merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan untuk dapat mencaai tujuan secara efektif serta efisien.

Menurut Terry (2009), pengelolaan (management), merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan; perencanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan yang dapat dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sarana-sarana yang telah dapat ditetapkan melalui pemanfaatan dalam sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Sejalan dengan teori Terry, Oey Liang Lee dalam (Suprpto 2011), juga mendefinikan manajemen sebagai seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, serta pengontrolan atas human and national (terutama human resources) untuk mencapai dalam tujuan yang telah dapat di tentukan terlebih dahulu.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli yang di atas, maka dapat di maksud dengan pengelolaan pada penelitian ini merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), serta pengawasan pengendalian terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

2.1.1.3. Pariwisata

Undang-Undang nomor 9 tahun 1990 (dalam Muljadi, 2009), tentang kepariwisataan disebutkan bahwa usaha pariwisata adalah perusahaan dibidang pariwisata yang menghasilkan produk tertentu. Produk wisata sebenarnya hanya merupakan suatu produk yang nyata (tangibie), akan tetapi juga merupakan suatu rangkaian produk (barang dan jasa) yang tidak hanya dapat mempunyai segi-segi yang dapat bersifat ekonomis, namun juga dapat bersifat sosial, psikologis serta alam. Produk wisata ini merupakan berbagai jasa dimana satu dengan yang lainnya terkait yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan dalam pariwisata, seperti akomodasi, angkutan dalam wisata, biro perjalanan, restoran, daya tarik wisata, serta perusahaan lain yang terkait. Sebagai suatu produk yang kompleks, merupakan produk wisata yang berbeda dari jenis produk serta jasa yang dapat dihasilkan oleh industri lainnya. Karena kekhasan inilah yang menjadikan suatu produk wisata satu jenis barang dan jasa yang unik, dan memerlukan penanganan khusus.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pasal 1 yang dimaksud wisata, wisatawan, dan pariwisata adalah sebagai berikut :

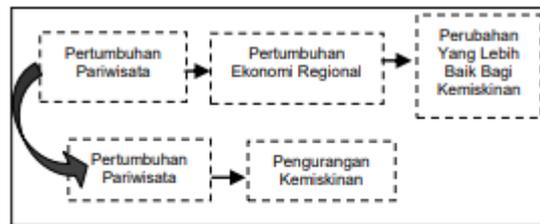
- a. Wisata adalah suatu perjalanan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat tertentu bertujuan berkreasi dan pengembangan pribadi atau mempelajari, keunikan daya tarik swasta yang dikunjungi dalam jangka waktu yang sementara.
- b. Wisatawan merupakan orang yang melakukan perjalanan waktu
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan dalam wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisata adalah seuruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang dapat bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul dalam wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah serta pengusaha.

Selanjutnya menurut Pitana & Diarta (2009), ada tiga komponen pokok yang secara umum disepakati dalam batasan pariwisata (khususnya pariwisata internasional), yaitu Traveller, Visitor, dan Tourist. Definisi yang dikemukakan dari komponen tersebut selalu mengandung unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya unsur travel (perjalanan), yaitu pergerakan manusia dari suatu tempat ke tempat lain.
- b. Adanya unsur tinggal sementara pada tempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya.
- c. Tujuan utama dari pergerakan manusia ini bukan untuk mencari penghidupan atau pekerjaan ditempat yang dituju.

Pariwisata sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mengurangi

kemiskinan. Berikut filosofi pertumbuhan pariwisata dan pengurangan kemiskinan (Michael, 2007:10).



Sumber: Michael, 2007:10

Gambar 2.1. Filosofi Pertumbuhan Pariwisata Dan Pengentasan Kemiskinan

2.1.1.4. Partisipasi Masyarakat

Pemahaman mengenai pariwisata sebagai suatu sistem tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat serta memiliki peran dalam menggerakkan sistem pariwisata. Aktor-aktor tersebut, baik individu maupun kelompok, disebut pula sebagai insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata. Secara umum, insan-insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Pilar masyarakat merujuk pada masyarakat umum yang ada pada destinasi atau lokasi wisata, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Termasuk didalamnya tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa. Pilar selanjutnya adalah pilar swasta yaitu asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata. Pilar terakhir adalah pemerintah yang memiliki wewenang pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya (Pitana & Gayatri, 2005).

Partisipasi masyarakat merupakan sebuah tindakan keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengembangan desa wisata. Proses keterlibatan tersebut dimulai dari mengidentifikasi masalah, identifikasi potensi, dan

kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan tentang solusi alternatif untuk menangani dan mengatasi masalah. (Isbandi, 2007 dalam Wahyuni, 2019). Partisipasi menjadi salah satu komponen yang harus ada dalam proses pembangunan. Melalui proses tersebut, kemampuan dan perjuangan masyarakat lokal adalah untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Partisipasi telah menjadi mitos dalam pembangunan. Hampir setiap negara mengumumkan secara luas kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan (Yunita, 2018).

Aktor utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah masyarakat lokal. Mereka harus mendapatkan keuntungan dari perkembangan industri pariwisata di daerahnya. Industri pariwisata secara tidak langsung akan menghasilkan dampak positif maupun negatif kepada masyarakat lokal. Dampak tersebut terdiri dari realitas sumber daya alam, budaya, tradisi, identitas, dan benda-benda warisan sejarah (Sedarmayanti et al, 2018). Fungsi dari partisipasi masyarakat pada dapat menjadi sebagai agen yang dapat merubah struktur pembangunan ekonomi dengan mengutamakan kepentingan kelompok masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan tersebut akan membawa pengaruh potensial untuk aktor perencanaan pembangunan untuk memancing perubahan sosial masyarakat (Wulandari et al, 2022).

2.1.2. Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Pariwisata berkelanjutan sesuai dengan konsep *community-based tourism* atau dikenal juga dengan *community-based tourism (CBT)*. Agar implementasinya dapat mendukung tercapainya tiga pilar keberlanjutan yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, konsep ini mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, melestarikan kualitas lingkungan hidup, dan menjaga kehidupan sosial dan budaya. lebih jauh lagi, lingkungan (Asker et al, 2010).

Pariwisata berbasis masyarakat peningkatan wisata dengan metodologi partisipatif untuk membentuk organisasi di antara mitra (Demartoto 2009: 21). Koordinasi, kerjasama, dan keseimbangan peran antara masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah diperlukan untuk pendekatan partisipatif. Kemajuan CBT juga membutuhkan dukungan penuh dari otoritas publik dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat kota hingga tingkat daerah/kota.

Menurut Rocharungsat (2008) agar pelaksanaan CBT berhasil, ada komponen yang harus diperhatikan, khususnya:

1. Sumber daya alam dan budaya
 - a. Ekonomi lokal dan modal produksi.
 - b. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan diperlukan untuk pelestarian sumber daya alam.
 - c. Budaya yang unik sebagai tujuan.
2. Organisasi masyarakat
 - a. Masyarakat berbagi kesadaran, norma, dan ideologi melalui organisasi komunitas.
 - b. Masyarakat memiliki tokoh filosofis yang memahami praktik lokal dan informasi serta pendekatan lingkungan.
 - c. Masyarakat memiliki rasa bangga yang sama terhadap informasi dan strategi lingkungan, ikut serta dikembangkan tanpa bantuan orang lain.
3. Manajemen
 - a. Masyarakat memiliki aturan dan pedoman untuk lingkungan, budaya, dan manajemen pariwisata
 - b. Organisasi lokal atau sistem yang ada untuk mengawasi pariwisata dengan kapasitas untuk menghubungkan wisata dan peningkatan masyarakat.
 - c. Manfaat tersebar dengan baik untuk wisata dan kemajuan daerah setempat.

- d. Keuntungan dari wisata memberikan kontribusi masyarakat terhadap peningkatan keuangan dan sosial masyarakat.

4. Pembelajaran

- a. Mendorong tumbuhnya pengalaman bersama di antara tuan rumah dan pengunjung.
- b. Ajarkan dan buat pemahaman tentang masyarakat dan gaya hidup yang berbeda.
- c. Meningkatkan perhatian terhadap konservasi alam dan sosial di kalangan wisatawan dan orang-orang terdekat (Rocharungsat, 2008 dalam Prabawati, 2013).

beberapa indikator agar kita dapat memastikan bahwa pendekatan *Community Based Tourism* itu berhasil maka elemen-elemennya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Alam dan Budaya

Sumber Daya Alam dan Budaya dimaksudkan bagaimana pemerintah dan masyarakat memperhatikan penghasilan alami di daerah tersebut sehingga melalui Sumber Daya Alam dan Budaya dapat menjadi faktor utama kemajuan di suatu daerah.

2. Organisasi-organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat yang bertujuan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan suatu daerah, baik melalui tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lapisan masyarakat lainnya. Sehingga dapat lebih mudah dalam menjaga suatu daerah bersama sama dan meningkatkan kesejahteraan di daerah tersebut.

3. Manajemen

Manajemen maksudnya seperti apa aturan peraturan yang ada pada daerah tersebut dijalankan dan bagaimana pemerintah menghubungkan pariwisata dan pembangunan masyarakat di suatu daerah atau bagaimana

memberdayakan masyarakat dalam tingkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

4. Pembelajaran (Learning)

Pembelajaran (Learning) yakni membina proses belajar antara tuan rumah dan tamu serta mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya cara hidup yang beragam. Juga memberikan edukasi mengenai potensi wisata pada daerah tersebut dan tentang kebersihan lingkungan (Rocharungsat, 2008 dalam Prabawati, 2013).

Strategi *community based-tourism* ini telah digunakan untuk pengembangan pariwisata di beberapa negara berkembang di ASIA (Rocharungsat, 2008:60). Dari penerapan *community based-tourism* tersebut banyak penelitian yang mengkaji evaluasi kriteria sukses *community based-tourism*.

Evaluasi yang telah dilakukan di beberapa negara di Asia (Rocharungsat, 2008:65) yaitu *community based-tourism* harus secara praktis melibatkan masyarakat luas, manfaat yang diperoleh dari *community based-tourism* harus di distribusikan secara merata keseluruhan tujuan masyarakat, memiliki manajemen yang baik untuk pariwisata, *community based-tourism* yang telah ada harus memiliki kemitraan yang kuat dan dukungan dari dalam dan luar masyarakat, dan konservasi lingkungan yang tidak boleh diabaikan.

Hal ini karena karakteristik pariwisata yang dapat mengurangi masyarakat miskin (Basuki, 2011:3) yaitu dengan wisatawan yang datang ketempat tujuan membuka peluang bagi penduduk lokal untuk memasarkan berbagai komoditi dan pelayanan, membuka peluang bagi upaya untuk mendiversikan ekonomi lokal yang dapat menyentuh kawasan – kawasan marginal, membuka peluang bagi usaha – usaha ekonomi padat karya yang berskala kecil dan menengah yang terjangkau oleh kaum miskin, tidak hanya tergantung pada modal, akan tetapi juga tergantung pada modal

budaya (cultural capital) dan modal alam (natural capital) yang sering kali merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat miskin.

Selain hal di atas, hal lain yang berkaitan dengan *Community Based Tourism* adalah kriteria ukuran kesuksesan *Community Based Tourism* yang didapat melalui penelitian evaluasi di beberapa negara di Asia (Rocharungsat,2008 dalam Prabawati, 2013) :

- a. Melibatkan Masyarakat Luas
- b. Manfaat dapat terdistribusikan secara merata pada semua masyarakat
- c. Manajemen pariwisata yang baik
- d. Kemitraan yang kuat baik ke dalam maupun ke luar
- e. Keunikan atraksi
- f. Konservasi lingkungan tidak terabaikan.

Pariwisata merupakan suatu sistem dari komponen-komponen yang saling mendukung. Menurut Pabrik dan Morrisin (2002 dalam Joshi,2012 dalam Prabawati,2013), pariwisata sebagai sebuah sistem yaitu :

- d. Di dalam kegiatan pariwisata terdapat ketergantungan yang berarti semua organisasi yang ada di dalam pariwisata bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan umum
- e. Pariwisata memiliki karakteristik yang terus berubah
- f. Pariwisata terdiri dari berbagai jenis kegiatan dan organisasi
- g. Pariwisata perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur yang independen dan harmoni antar elemen sehingga dapat tercapainya keberhasilan pariwisata.

Sistem pariwisata juga terdiri dari elemen-elemen kepariwisataan (Warpani,2006:23)yaitu :

- a. Utama, yakni daya tarik yang menjadi pemicu adanya pariwisata dan penduduk sebagai pelaku pariwisata dan tuan rumah pariwisata.

- b. Prasyarat, yakni perangkutan untuk proses berlangsungnya pariwisata.
- c. Penunjang, yakni informasi dan promosi untuk membangun dan mendorong minatberwisata.
- d. Sarana pelayanan yakni elemen pariwisata yang membuat proses kegiatan pariwisatamenjadi lebih mudah, nyaman, aman dan menyenangkan berupa hotel, penginapan dan lain-lain.

Selain itu sistem pariwisata menurut Mason (2003) yang diadaptasi dari model Middleton (1994) dan Leiper (1990), terdiri atas sektor-sektor sebagai berikut :

- b. Akomodasi
- c. Promosi
- d. Atraksi
- e. Transportasi
- f. Pengunjung (Visitor)

Pemerintah memainkan peran penting dalam pengembangan CBT. Penguatan masyarakat sekitar destinasi merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan. Peran komunitas daerah setempat dalam kemajuan wisata sangat bergantung pada sejauh mana mereka memiliki peluang dan kekuatan (Beeton 2006: 82). Melalui regulasi, pemerintah berperan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses, kontrol, peluang, dan kuasa atas pengembangan pariwisata. Regulasi adalah suatu usaha administrasi yang telah diberikan otoritas atau posisi untuk mengarahkan pengembangan khusus di lingkungan mereka yang mempengaruhi perluasan akses, kontrol, peluang dan kekuatan wilayah lokal. Pihak lain dapat diminta untuk mendukung atau melaksanakan kebijakan pemerintah yang mendorong pemberdayaan masyarakat jika aturan tertentu ditegakkan oleh pemerintah. Regulasi adalah alat yang digunakan pemerintah dalam pengembangan CBT untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan pariwisata tetap

bertindak sesuai dengan kebijakan dan peraturan pariwisata yang telah ditetapkan (Pitana & Diarta, 2009: 118).

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan melekatkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global. (Masriana. 2019). Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*), merupakan pengembangan pariwisata dengan tingkat keterlibatan masyarakat setempat yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.

World Wide Found for Nature (WWF) menyatakan *Community Based Tourism (CBT)* sebagai “*Form of tourism where the local community has a substantial control over and involvement in ts development and management; and a major proportional of the benefits remain within the community.*” Jika diartikan secara bebas pariwisata berbasis masyarakat juga dapat dimaknai sebagai penyediaan produk, jasa, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditemukan di dalam komunitas lokal, serta ditawarkan oleh pelaku atau stakeholder lokal sendiri (“*Kyrgyz Community Based Tourism,*” n.d., diakses tanggal 23 januari 2023).

World Wide Found for Nature (WWF) menyatakan pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) sebagai "Form of tourism where the local community has a substantial control over and involvement in ts development and management; and a major proportional of the benefits remain within the community." Pariwisata berbasis masyarakat juga dapat diartikan sebagai penyediaan barang, jasa, pengetahuan, dan keterampilan

yang bersumber dari lokal oleh aktor atau pemangku kepentingan lokal itu sendiri (Pariwisata Berbasis Komunitas Kyrgyz, n.d., didapat pada 23 Januari 2023).

Cox dalam Pitana (2009) mengatakan bahwa "Pembangunan peristiwa dan peningkatan objek wisata bergantung pada perawatan yang baik terhadap lingkungan dan rasa kedekatan yang luar biasa yang mencerminkan keunikan warisan sosial dan keunikan lingkungan." Oleh karena itu, setiap peningkatan tujuan yang dilakukan harus mencakup konten yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal, mengingat untuk pengembangan daya tarik wisatawan, kesehatan, dan fasilitas perjalanan. *Community Based Tourism* (CBT) dianggap sebagai tahap yang wajar untuk membuat desa wisata yang berkualitas dan ekonomis. Wisatawan bisa menikmatinya sementara penduduk setempat tetap bekerja sesuai dengan karakternya. Sehingga, hasil tangan masyarakat setempat dapat menambah banyaknya objek wisata, sementara para wisatawan dapat mengapresiasinya dengan penuh kepuasan, maka hal tersebut diyakini akan mempengaruhi keteguhan para wisatawan tersebut dalam berwisata..

Strategi *Community Based Tourism* untuk pemberdayaan masyarakat menyarankan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Salah satu teknik potensial untuk penguatan kawasan lokal adalah peningkatan pengembangan wisata berbasis masyarakat, yang dianggap memiliki kualitas dan karakter yang unik yang disampaikan Nasikun dalam seminar hand out Peningkatan Metodologi dan Para Pengelola Resor dan Relaksasi Gumelar S. Sastrayuda (2010, h.3). dinyatakan sebagai berikut:

2. Wisata berbasis masyarakat menemukan kehati-hatiannya dalam properti dan kualitas dan atribut unik yang lebih baru dalam asosiasi dalam skala terbatas, pariwisata semacam ini pada dasarnya dilindungi secara alami, dan tidak memiliki berapapun

banyak konsekuensi merugikan yang ditimbulkan oleh jenis pariwisata konvensional;

3. Pariwisata berbasis masyarakat dapat dikelola oleh masyarakat lokal dan pemilik usaha karena memiliki potensi untuk mengembangkan daya tarik dan produk wisata yang lebih kecil; Juga,
4. Ini terkait erat dan sebagai hasil dari pariwisata yang lebih dari biasanya, di mana jaringan lingkungan terlibat dengan mengambil bagian dalam keuntungan dari peningkatan wisata, dan dengan demikian jaringan tambahan yang memungkinkan.

Murphy dalam Sunaryo (2013: 139), faktor utama yang menggerakkan kegiatan pariwisata itu sendiri pada hakekatnya adalah sumber daya alam dan keistimewaan masyarakat lokal, baik berupa unsur fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya). pariwisata harus dilihat sebagai tindakan berbasis wilayah lokal. Berikut ini adalah definisi dari pariwisata berbasis masyarakat:

1. Jenis pengelolaan wisata yang membuka peluang bagi jaringan lingkungan untuk mengontrol dan terhubung secara efektif dengan pengelolaan dan kemajuan wisata yang ada.
2. Jenis pariwisata yang dapat memberikan kesempatan kepada orang-orang yang terkait langsung dengan organisasi wisata juga dapat memperoleh keuntungan dari keberadaan wisata tersebut.
3. Jenis wisata yang meminta penguatan yang efisien dan berbasis suara serta sirkulasi keuntungan yang adil untuk jaringan yang terhambat dalam kekurangan.

Adanya kepastian partisipatif aktif dari masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan yang ada sangat erat kaitannya dengan kepariwisataan berbasis masyarakat. Ada dua perspektif tentang partisipasi masyarakat dalam pariwisata: partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi dalam distribusi manfaat pembangunan pariwisata

kepada masyarakat. Selanjutnya, pada dasarnya ada tiga standar utama yang berbasis lokal dalam teknik pengaturan kemajuan pariwisata based tourism, yaitu:

- 1) Melibatkan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- 2) Ada keyakinan bahwa jaringan lingkungan mendapatkan keuntungan dari kegiatan wisata.
- 3) Pendidikan industri wisata untuk jaringan lingkungan (Sunaryo, 2013: 140).

Suansri (2013) menetapkan beberapa standar CBT yang harus dilakukan, yaitu:

- a) Mengakui, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata;
- b) Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahapan pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya;
- c) Meningkatkan kebanggaan masyarakat yang bersangkutan;
- d) Meningkatkan kualitas hidup;
- e) Menjamin kelestarian lingkungan;
- f) Melindungi karakteristik (keunikan) dan budaya masyarakat setempat;
- g) Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;
- h) Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) Membagi keuntungan dan manfaat yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat;
- j) Berkontribusi dengan tingkat upah tertentu yang diperoleh untuk perbaikan daerah setempat, dan
- k) Menampilkan legitimasi hubungan antara area lokal dan keadaan saat ini.

Menurut Nurhidayati (2012), pariwisata berbasis masyarakat sebagai strategi pembangunan merupakan salah satu jenis perencanaan partisipatif untuk pengembangan pariwisata. Pariwisata berbasis

masyarakat menurut Suansri (2013) adalah pariwisata yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, sosial, dan budaya.

Gumelar (2010) juga menambahkan bahwa wisata berbasis kawasan lokal merupakan pendekatan penguatan yang memasukkan dan menempatkan kawasan lokal sebagai penghibur yang signifikan dalam kaitannya dengan peningkatan pandangan dunia lainnya, khususnya pergantian peristiwa yang layak. Industri perjalanan berbasis kawasan lokal merupakan peluang untuk mempersiapkan seluruh potensi dan elemen masyarakat, untuk menyesuaikan pekerjaan organisasi industri perjalanan yang cakupannya sangat luas. Pariwisata berbasis masyarakat bukan berarti menjadi peluang untuk menyeimbangkan peran pelaku usaha pariwisata berskala besar dengan mengerahkan seluruh potensi dan dinamika masyarakat. Lokal berdasarkan industri perjalanan tidak berarti bahwa itu hanya usaha kecil dan lingkungan, tetapi harus diatur dalam kaitannya dengan kolaborasi lokal global.

Industri wisata berbasis kawasan lokal adalah pariwisata yang mengakui dukungan sosial, sosial dan ekologis. Jenis wisata ini diawasi dan diklaim oleh masyarakat setempat dapat membantu para wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengetahui gaya hidup masyarakat sekitar (Muallisin dalam Purbasari, 2014). Sudut pandang ini menunjukkan bahwa CBT berbeda dari pengembangan pariwisata secara keseluruhan (pariwisata massal). Di CBT, area lokal adalah penghibur utama dalam proses kemajuan wisata, dengan tujuan mendasar untuk memperluas ekspektasi individu akan kenyamanan sehari-hari. Peningkatan kota-kota wisata sangat disarankan untuk menerapkan ide *Community Based Tourism* (CBT) sebagai prinsip pergantian acara. CBT direncanakan sebagai instrumen untuk perbaikan kawasan lokal dan perlindungan alam. Untuk itu perlu dilihat secara umum dari sudut pandang yang dapat mempengaruhi wilayah lokal seperti pandangan sosial, sosial, moneter, alam dan politik. Menurut "Pariwisata Berbasis Masyarakat Kyrgyz," 2017: "Semua ini dimiliki,

dikelola, dan dinikmati oleh masyarakat." 2016 Herman). Menurut Suansri, Yeejaw haw, & Richards (2013), pengembangan CBT bertujuan untuk mendidik pengunjung tentang cara hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran pengunjung.

Peningkatan wisata Berbasis Daerah membutuhkan kerjasama daerah yang besar, dalam gagasan industri perjalanan, dalam gagasan industri perjalanan berbasis daerah, daerah setempat harus dididik untuk mengawasi tujuan industri perjalanan untuk mencapai ekonomi. industri perjalanan (Sunaryo, 2013).

Latihan peningkatan wisata serta kemajuan di berbagai bidang, umumnya mencakup pekerjaan semua mitra saat ini dan terkait. Sesuai Murphy dalam Rahim (2012: 2) mengungkapkan bahwa mitra dalam industri perjalanan menggabungkan 3 (tiga) pihak untuk lebih spesifik; Daerah Pemerintahan, Swasta dan Lokal, dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing. Mitra-mitra ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bersinergi satu sama lain untuk mencapai dan memahami tujuan dan sasaran kemajuan yang disepakati. Sunaryo (2013:218) mengatakan bahwa daerah setempat sebagai salah satu mitra memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam mendukung hasil peningkatan industri perjalanan. Setiap upaya atau program pembangunan harus mempertimbangkan posisi, potensi, dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan, mulai dari kerangka perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberhasilan pembangunan pariwisata. Salah satu gagasan yang masuk akal tentang kerja daerah setempat dalam peningkatan industri perjalanan adalah Local Area Based The Travel Industry (CBT).

Secara konseptual, pariwisata berbasis masyarakat didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam semua kegiatan pariwisata dengan diberdayakan, sehingga masyarakat mendapatkan hasil yang maksimal dari pariwisata. Tujuan mendasar dari

kemajuan industri perjalanan harus bekerja pada bantuan pemerintah dari daerah terdekat di wilayah pengembangan industri perjalanan.

Desainer pengembangan pariwisata sering menggunakan konsep CBT untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sebagai mitra industri pariwisata. Tujuannya untuk memberdayakan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan nilai pariwisata, khususnya bagi wisatawan (Hermantoro, 2011: 130).

Terlebih lagi, pariwisata sebagai sistem untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini diungkapkan oleh Scheyvens (2011), bahwa wisata merupakan bidang keuangan yang menjanjikan untuk metodologi pelanggaran kebutuhan. Lee dkk. (2019) mengungkapkan bahwa Pariwisata Berbasis Masyarakat memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan karena kontribusinya terhadap pengembangan masyarakat dan dengan demikian keberlanjutan masyarakat dipastikan meningkat. Pariwisata berbasis masyarakat tidak persis sama dengan pendekatan pengaturan wisata secara dari atas-kebawah, karena pendekatan ini menekankan masukan dan kontrol lingkungan mengenai jenis, skala, dan kekuatan peningkatan pariwisata (Othman, Sazali, dan Mohamed, 2013). Menurut Suansri, Yeejaw-haw, & Richards (2013), pengembangan CBT bertujuan untuk mendidik pengunjung tentang cara hidup masyarakat dan meningkatkan kesadaran pengunjung. Peningkatan pariwisata Berbasis masyarakat membutuhkan dukungan daerah yang besar, dalam gagasan wisata berbasis masyarakat, daerah setempat harus dididik untuk mengawasi keberadaan pariwisata untuk mencapai praktis kepariwisataan yang baik (Sunaryo, 2013).

Kehadiran wisata dapat dimanfaatkan untuk menggarap perekonomian daerah setempat, terutama bagi mereka yang ekonominya rendah. Melibatkan daerah setempat untuk bertukar atau terkait dengan peningkatan sarana-prasarana wisata akan memberikan perluasan bantuan keuangan pemerintah untuk daerah setempat. Wajar jika pengelola wisata

dari pemerintah daerah atau pengelola bertanggung jawab atas hal tersebut (Masriana, 2019). Berangkat dari penelitian tersebut maka dalam penelitian ini sangat erat kaitanya dengan pengembangan objek wisata di Desa Karangjaya apakah berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setelah adanya pengembangan yang dilakukan oleh pengelola wisata, dilihat sebelum dan sesudah adanya pengembangan dari hasil pendapatan masyarakat di objek wisata perminggu dan perbulannya.

2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Dalam penelitian (Ika Nur Yuliani, 2018) bahwa penerapan CBT yang dilaksanakan di Wana Wisata Sumberboto Kabupaten Jombang, Seperti yang sebelumnya telah disampaikan, Wana Wisata Sumberboto merupakan sebuah wisata alam yang dalam pengelolaannya telah melakukan suatu koordinasi yang baik dan terintegrasi antara masyarakat dengan pihak pengelola wana wisata Sumberboto, maupun pihak pengelola wana wisata Sumberboto dengan Perum Perhutani KPH Jombang, bahkan Perum Perhutani KPH Jombang dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Jombang. selain itu dalam proses pengembangan pada Wana Wisata Sumberboto, tingkat partisipasi masyarakat sudah sangat baik, ditunjukkan juga dengan keikutsertaan masyarakat dalam segala kegiatan yang diadakan oleh Wana Wisata Sumberboto. Disamping pendukung pasti terdapat penghambatnya di dalam pengembangan diantaranya Proses pengembangan pariwisata tidak lepas dari kendala yang menghambat keberhasilannya. Upaya Perum Perhutani KPH Jombang selaku pengelola Wana Wisata Sumberboto dalam proses pengembangan wisata alam berbasis masyarakat masih terkendala salah satunya adalah masalah anggaran. Hal ini dikarenakan Perum Perhutani KPH Jombang mempunyai banyak obyek wisata lain yang perlu mendapatkan perhatian lebih selain Wana Wisata Sumberboto. Kendala lain yang menghambat pengembangan Wana Wisata Sumberboto adalah masih belum adanya

investasi dari swasta yang sesuai dengan visi dan misi Perum Perhutani KPH Jombang. Investasi merupakan faktor penting untuk menunjang pengembangan.

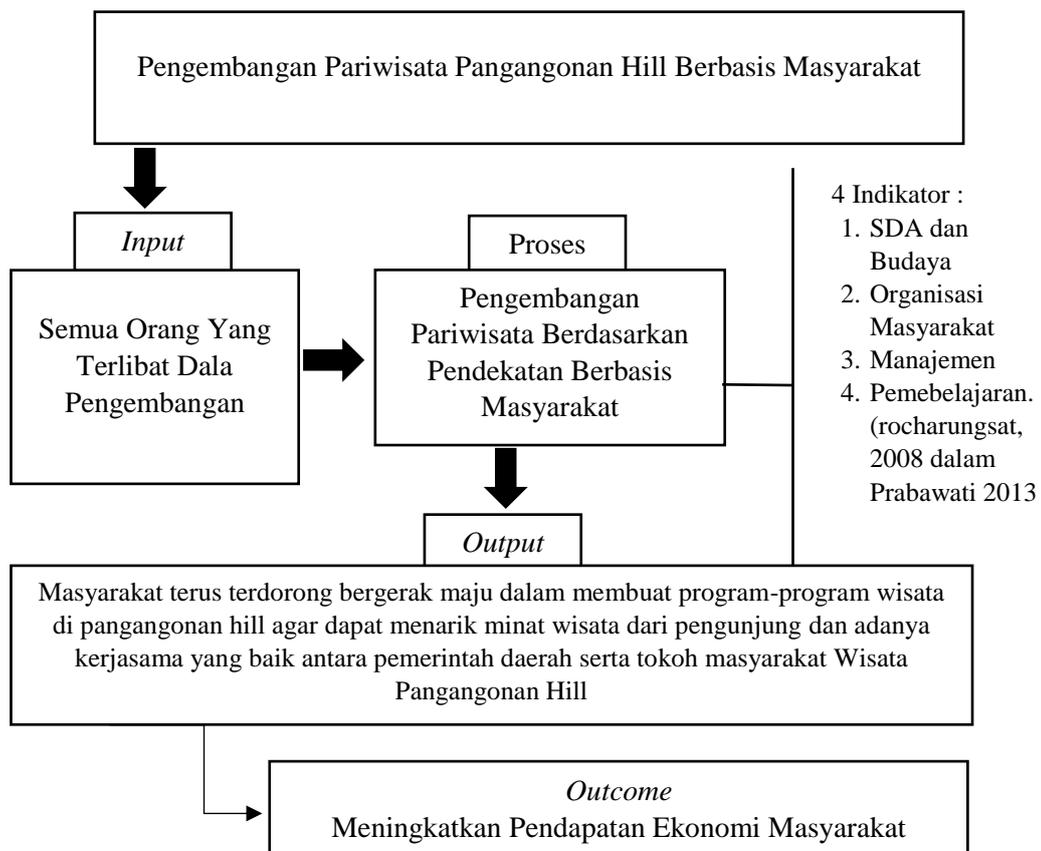
2. Dalam Wilopo dan Marwadi, (2016) menunjukkan bahwa penggunaan CBT di wisata Pantai Cilungkup sangat bagus, penggunaan CBT harus terlihat dari kerjasama yang baik dari semua aspek, termasuk pertumbuhan masyarakat, dukungan juga dari lingkungan. Selain memiliki dampak ekonomi yang positif, keberadaan dana untuk kelompok, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, dan pembagian keuntungan yang adil. Namun, penerapannya terkendala sejumlah faktor, antara lain sumber daya manusia yang masih kurang memadai, anggota kelompok yang melakukan kecurangan, kurangnya sinergi antar sektor, dan kepemilikan lahan Perhutani.
3. Dalam eksplorasi Rorah, (2012), menunjukkan bahwa pengurusan industri perjalanan di Kota Kebonagung dilakukan langsung oleh daerah setempat melalui POKDARWIS. diarahkan pada budaya lokal. Pada tahap penataan Kota Wisata Kebonagung, daerah setempat kurang terlibat, tingkat kerjasama yang digambarkan adalah pandangan dunia *Degree of Hypocrisy*. Pada tahap pelaksanaan program kota wisata sejauh ini jumlah orang yang berperan aktif dalam mengelola kota wisata masih sedikit, namun jika dilihat dari segi kerjasamanya. Pada tahap pelaksanaan, tingkat ketertarikan yang ditunjukkan adalah tingkat kekuatan penduduk, karena daerah sendiri yang mengawasi dan menyimpulkan bagaimana kegiatan wisata dilakukan. Pada tahap pengkajian jenis kerjasama daerah sebagai komitmen analisis dan gagasan, derajat kepentingan yang digambarkan adalah tingkat posturing. Tingkah laku baik buruknya daerah ditunjukkan dengan ikut serta menjaga kerapihan iklim terlibat dalam pendaftaran POKDARWIS dan terlibat dalam administrasi tujuan liburan, kantor dan kemudahan, sedangkan kontra yang terjadi secara lokal

menggabungkan perspektif yang disimpulkan pada awal pengembangan kota industri perjalanan dan administrasi keuangan yang tidak mudah sehingga menunjukkan apa yang dilakukan masyarakat.

4. Dalam Masriana (2019). Menunjukkan bahwa penyelenggaraan industri perjalanan berbasis daerah telah berjalan secara menyeluruh terlihat dari dukungan masyarakat daerah dalam dinamika kemajuan industri perjalanan, terdapat keyakinan bahwa jaringan lingkungan memperoleh manfaat dari kegiatan industri perjalanan secara finansial. Dari pandangan secara langsung dan secara tidak langsung sejumlah besar pengunjung yang datang ke ide tepi laut tujuan industri perjalanan dapat melihat dan mendistribusikan tradisi dan adat istiadat daerah lokal setempat, memastikan pemeliharaan tidak merusak iklim, sambil tetap menjaga karakter lingkungan dan budaya. dan juga didukung oleh keunggulan yang sangat baik meskipun tidak ada biaya. Selain faktor pendukung, ada juga faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan pariwisata. Faktor-faktor tersebut antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan ketidakjelasan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata dan kebersihan tempat wisata, yang terus menjadi perhatian utama pengembangan pariwisata.
5. Dalam mendukung penelitian ini, terdapat penelitian yang diarahkan oleh Ayu Lestari (2020). menunjukkan bahwa penyelenggaraan Daerah setempat menggabungkan industri wisata yang berkaitan dengan Pulau Lae dengan asumsi kekayaan alam dan sosial merupakan salah satu faktor utama yang menarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Lae, karena di Pulau Lae juga terdapat sumber makanan yang istimewa. suku Bugis dan Makassar, khususnya makanan ringan seperti berbagai macam kue. Asosiasi lokal di Pulau Lae benar-benar fokus pada rasa kolaborasi bersama antara penduduk individu untuk mengelola industri perjalanan di Pulau Lae, karena Asosiasi Muda di pulau itu masih dalam

masa pembentukan. Para eksekutif di Pulau Lae tidak mendapat syafaat dari pihak manapun, sehingga industri travel kerangka pengurus di Pulau Lae diserahkan sepenuhnya kepada daerah setempat namun tetap dalam pengawasan pemerintah. Sementara pembelajaran di Pulau Lae masih dalam tahap membangun perkantoran, misalnya memuat data, rambu-rambu, tempat wisata, dan denah kawasan Pulau Lae. Motivasi di balik kantor ini adalah untuk mempermudah wisatawan lokal dan asing untuk melihat ke Pulau Lae. Namun demikian, otoritas publik masih belum ideal dalam kerangka berpikir untuk memajukan potensi yang ada di Pulau Lae dari waktu ke waktu dan nantinya masalah sampah dapat diselesaikan atau membatasi volume sampah yang ada.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir yang dibuat berdasarkan dengan rumusan masalah, dan terdapat 4 indikator pengembangan pariwisata Pangangonan Hill. Teori yang digunakan dalam kerangka pikir ini adalah teori *Community Based Tourism* dari (Rocharungsat. 2008 dalam prabawati, 2013).

Berdasarkan indikator di atas maka berikut adalah analisa dari peneliti yang di dapatkan di Pangangonan Hill Desa karangjaya Kecamatan Karangjaya kabupaten Tasikmalaya mengenai pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat di Pangangonan Hill Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam dan Budaya adalah bagaimana otoritas publik dan masyarakat fokus pada peluang alam di daerah dengan tujuan agar sumber daya alam dan budaya dapat menjadi elemen utama kemajuan di daerah.
2. Organisasi dalam masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pertumbuhan suatu daerah melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lapisan masyarakat lainnya. sehingga dapat lebih sederhana untuk menjaga kebersamaan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
3. Manajemen, yang berarti pedoman seperti apa yang ada di daerah itu dijalankan dan bagaimana pemerintah menghubungkan wisata dan kemajuan daerah atau bagaimana memungkinkan masyarakat pada tingkat keuangan dan sosial masyarakat meningkat.
4. Pembelajaran, pembelajaran secara khusus mendorong pengalaman yang berkembang di antara tuan rumah dan pengunjung serta mendidik dan membangun pemahaman tentang gaya hidup sosial yang berbeda, juga mengajarkan tentang kebersihan lingkungan dan potensi pariwisata di daerah tersebut.

Berdasarkan Bagan di atas, Peneliti dapat memaparkan bahwa input dari permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu semua yang terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui proses pengembangan pariwisata yaitu dengan pengembangan

secara berbasis masyarakat oleh seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Pangangonan Hill, dasar teori yang diambil dari (Rocharungsat 2008, dalam Purbawati 2013) sehingga hasil dari berjalannya pengelolaan yang sesuai dengan dasar teori tersebut yaitu terciptanya dorongan untuk meningkatkan pengembangan wisata supaya lebih baik lagi dan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam hal memanfaatkan lebih baik dari pemanfaatan objek wisata sehingga pendapatan ekonomi masyarakat meningkat.

2.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dalam penelitian ini pertanyaan penelitian sebagai berikut; Bagaimana Pengembangan Pariwisata Pangangonan Hill Berbasis Masyarakat (Studi di Desa Karangjaya Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya)?